



Urgensi sustainability reporting pada pemerintah daerah: sebuah analisis studi wacana

Indra Basir¹, Muhammad Ihsan Ansari², Nur Fitriani³

AFILIASI:

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi, Universitas Sulawesi Barat

*KORESPONDENSI:

indrabasir@unsulbar.ac.id

THIS ARTICLE IS AVAILABLE IN: <https://ejournal.umc.ac.id/index.php/JPK>

DOI: [10.32534/jpk.v11i4.6481](https://doi.org/10.32534/jpk.v11i4.6481)

CITATION:

Basir, I., Ansari, M. I. ., & Fitriani, N. . (2024). Urgensi sustainability reporting pada pemerintah daerah: sebuah analisis studi wacana: URGENSI SUSTAINABILITY REPORTING PADA PEMERINTAH DAERAH SEBUAH ANALISIS STUDI WACANA. *Jurnal Proaksi*, 11(4), 805–816. <https://doi.org/10.32534/jpk.v11i4.6481>

Riwayat Artikel :

Artikel Masuk:

26 September 2024

Di Review:

19 November 2024

Diterima:

3 Desember 2024

Abstrak

Permasalahan lingkungan hidup saat ini menjadi isu utama yang memerlukan pendekatan holistik untuk penanggulangannya. Kerusakan alam akibat pembangunan, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta, memperburuk kondisi ini, mengancam ekosistem dan kesejahteraan masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif berbagai pihak (pemerintah, badan perwakilan, dan NGO) tentang urgensi penerapan laporan keuangan berkelanjutan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi wacana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu lingkungan menjadi tekanan besar bagi pemerintah, dengan dampak kerusakan yang tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. Meskipun lingkungan diakui sebagai prioritas strategis, terdapat kesenjangan antara kesadaran pemerintah daerah dan implementasi kebijakan yang mendukung keberlanjutan. Laporan keuangan berkelanjutan, yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, diidentifikasi sebagai instrumen penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, untuk menerapkannya masih menghadapi tantangan, seperti belum adanya regulasi yang jelas dan pemahaman yang terbatas tentang standar pelaporan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi, kebijakan pembangunan berkelanjutan, serta kolaborasi multi-pihak agar pertumbuhan ekonomi daerah tidak mengorbankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial di masa depan.

Kata Kunci: Sustainable Reporting, Pemerintah Daerah, Studi Wacana, Transparansi, Akuntabilitas

Abstract

Today's environmental challenges require a holistic approach. Development activities by governments and private sectors have exacerbated environmental degradation, impacting ecosystems and community welfare. This study analyzes the perspectives of various stakeholders—government, legislative institutions, and NGOs—on the urgency of implementing sustainable financial reports as a form of local government accountability in preserving environmental sustainability. Using a qualitative method with a discourse study approach, the research reveals significant pressure on governments to address environmental issues, which will only intensify in the future. While environmental sustainability is acknowledged as a strategic priority, a gap persists between local government awareness and the implementation of supportive policies and budgets. Sustainable financial reporting, integrating environmental, social, and governance aspects, is a vital tool to enhance transparency and accountability in managing natural resources. However, challenges such as inadequate regulations and a limited understanding of reporting standards hinder its application. The study underscores the need to strengthen regulatory frameworks, promote policies aligned with sustainable development, and foster multi-stakeholder collaboration. These steps are essential to ensure that regional economic growth does not compromise environmental sustainability or social welfare, safeguarding resources for future generations.

Keywords: Sustainable reporting, government, Discourse studies, Transparency, Accountability.

PENDAHULUAN

Dalam dua puluh tahun terakhir, konsep pembangunan tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, terutama karena semakin banyaknya bencana alam yang terjadi akibat penurunan kualitas lingkungan (Natalia, 2022). Kondisi semakin diperjelas oleh survey yang dilakukan *Word Economic Forum* yang menjelaskan bahwa isu krisis lingkungan hidup dalam sepuluh tahun kedepan seperti cuaca ekstrim, perubahan kritis pada sistem bumi, Kehilangan keanekaragaman hayati dan keruntuhan ekosistem, dan kekurangan sumber daya alam (Forum, 2024).

Terdorong oleh dampak negatif yang timbul dari proses pembangunan ekonomi, muncul kebutuhan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial (Anindita & Hamidah, 2020). Jika kondisi ini tidak dapat dihentikan dampak buruk kerusakan lingkungan akan mengancam keberadaan seluruh spesies hidup di bumi (Akbaş, 2022). Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan sosial dan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sejalan dengan inisiatif global untuk melaksanakan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bekerjasama dengan berbagai pemerintah, civil society, dan pelaku ekonomi dari seluruh dunia. Beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan seperti, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Republik Indonesia, 2012) dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Republik Indonesia, 2017). Namun, kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah nyatanya tidak memberikan dampak perbaikan yang signifikan. Bahkan, kerusakan lingkungan akibat aktivitas eksploitasi manusia semakin memburuk (Natalia, 2022). Beberapa tantangan diantaranya kurangnya wawasan, keterlibatan penerimaan pemangku kepentingan, dan kebutuhan akan model pelaporan yang tepat (ak, 2022; Kaur & Lodhia, 2019), aspek tata kelola, budaya organisasi (Armstrong & Li, 2022). Perencanaan jangka panjang Indonesia tahun 2025-2045 bahkan memasukkan isu lingkungan sebagai isu prioritas utama untuk ditangani.

Sektor publik juga harus terlibat dalam praktik pelaporan keberlanjutan, yang semula diwajibkan hanya pada sektor swasta. Seiring dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas terhadap isu-isu keberlanjutan, sektor publik diharapkan untuk ikut berperan dalam mempromosikan praktik pelaporan keberlanjutan (Uyar et al., 2021). Meskipun *sustainability reporting* telah disusun oleh sektor swasta, masih belum cukup untuk menangani kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Selain itu, kelemahan dari pelaporan tujuan pembangunan berkelanjutan adalah memiliki cakupan yang sangat luas, tidak berfokus pada persoalan lingkungan hidup (Williams et al., 2009). Laporan SDGs tidak memuat informasi-informasi penting tentang lingkungan hidup seperti besaran alih fungsi lahan yang terjadi, berapa banyak pohon yang ditebang, berapa besar limbah yang dihasilkan, investasi yang merusak ekosistem lingkungan, dan berapa besar defisit lingkungan aktivitas penambangan. Selain itu, keterbatasan lainnya ialah tidak dapat memuat sebesar-besarnya biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan lingkungan, investasi lingkungan yang dilakukan, dan masih banyak informasi penting lainnya.

Kondisi tersebut menunjukkan keikutsertaan pemerintah dalam menjaga keberlangsungan lingkungan masih sangat terbatas, pemerintah Indonesia hanya mewajibkan sektor swasta untuk menyusun laporan keberlanjutan dan sebatas pada pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Pendekatan lain yang perlu untuk dilakukan adalah pelaporan keuangan berkelanjutan. Saat ini urgensi dalam penerapan laporan keuangan berkelanjutan bukan hanya pada sektor swasta, tetapi juga dalam organisasi pemerintah, termasuk pemerintah daerah (*local government*) (Uyar et al., 2021). Beberapa penelitian didunia mulai mendorong pemerintah untuk

membuat laporan keuangan berkelanjutan (M. M. Hossain, 2018; Moses et al., 2020; Niemann & Hoppe, 2018; Uyar et al., 2022). Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah memiliki pengaruh yang kuat dalam memberikan informasi yang transparan, akuntabel (Niemann & Hoppe, 2018), dan tata kelola yang baik (Basir, 2023) dalam mengembalikan kelestarian lingkungan. Salah satu pengaruh pelaporan keuangan berkelanjutan oleh pemerintah pada perubahan manajemen perubahan organisasi yang berkelanjutan (Domingues et al., 2017).

Pelaporan keuangan berkelanjutan oleh pemerintah daerah merupakan jalan baru yang perlu dilakukan. Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini, mengharuskan pendekatan yang holistik. Tanggungjawab pemerintah untuk memastikan keberlanjutan lingkungan agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang (Mulawarman & Kamayanti, 2018) Penelitian ini akan difokuskan pada *green economy* khususnya akuntansi lingkungan dan akuntansi pemerintahan. Riset ini akan memfokuskan pada permasalahan pengungkapan laporan keuangan berkelanjutan pada pemerintah daerah, melalui perspektif aktor-aktor yang terlibat langsung dalam topik penelitian ini. Penelitian terkait topik ini masih sangat terbatas di Indonesia mengenai kajian wacana pelaporan keuangan berkelanjutan, khususnya bagi pemerintah daerah.

Lingkungan hidup telah lama menjadi topik yang menarik perhatian, mencerminkan pentingnya isu ini untuk terus dikaji secara mendalam dan berkesinambungan. Namun, banyak riset yang masih berfokus pada teori dan eksplorasi konsep, sementara praktik nyata kerap terabaikan. Penelitian ini hadir untuk mengungkap perspektif informan terhadap pelaporan keuangan berkelanjutan, sebuah pendekatan yang diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara wacana akademis dan implementasi nyata. Dengan mengusung solusi yang relevan dan efektif, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi tantangan lingkungan yang semakin mendesak. Selain itu, hasil kajian ini diharapkan menjadi pijakan penting bagi perumusan kebijakan pelaporan keuangan berkelanjutan di tingkat pemerintah daerah serta menjadi referensi berharga untuk penelitian lanjutan di masa depan.

KAJIAN PUSTAKA

Agency Theory

Teori lembaga, kerangka kerja yang berasal dari ekonomi, semakin diterapkan untuk memahami dinamika dalam sektor publik, terutama dalam hubungan antara entitas pemerintah dan organisasi lain. Teori ini memberikan wawasan tentang kompleksitas tata kelola, kontrol, dan manajemen kinerja di baik lembaga publik dan swasta (Hussain et al., 2018). Teori ini menyediakan kerangka kerja untuk mengatasi masalah prinsip-agen, di mana pemerintah sebagai agen untuk mengelola pemerintahan berusaha untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat sebagai principal tentang keseimbangan ekologis, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi bisa dirasakan (Burgess et al., 2017). Dalam konteks penelitian ini teori stakeholder menjelaskan peran pemerintah dalam memastikan kepentingan principal (masyarakat) untuk memperoleh lingkungan hidup berkelanjutan. Laporan keuangan berkelanjutan dapat menjadi salah satu instrument untuk menjembatani kepentingan antara pemerintah dan Masyarakat.

Sustainable Development Goal (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah kerangka kerja komprehensif yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015, yang bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan global pada tahun 2030. Tujuh belas tujuan ini mencakup isu-isu seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, perdamaian, dan keadilan, dan dirancang untuk menjadi universal, menghormati konteks dan prioritas nasional. SDGs berakar pada konsep pembangunan berkelanjutan, yang berupaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan (French & Kotzé, 2018). Keseimbangan ini sangat penting untuk memastikan kesejahteraan generasi saat ini dan masa depan (Abidi, 2020). Tujuan dirancang untuk menjadi multi-dimensi dan terintegrasi, membutuhkan pendekatan holistik untuk

pengembangan yang mempertimbangkan saling ketergantungan yang kompleks antara sektor yang berbeda (Roberto et al., 2020).

Sustainability Reporting

Pelaporan keberlanjutan selama ini diimplementasikan pada sektor swasta yang merupakan komponen penting dari strategi perusahaan, yang mencerminkan komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dan praktik bisnis yang bertanggung jawab (Mihai & Aleca, 2023). Di Eropa, Petunjuk Informasi Non-Keuangan mengamankan pelaporan keberlanjutan, mempengaruhi sikap manajerial dan kualitas laporan (García-Machado et al., 2023; Williams et al., 2010). Dibeberapa negara *Sustainability Reporting* tidak hanya diwajibkan pada perusahaan melainkan diwajibkan juga pada organisasi sektor publik. Laporan ini menjadi bentuk akuntabilitas sosial lingkungan sebuah institusi (García-Machado et al., 2023; Othman et al., 2017).

Triple Bottom Line

Teori ini dikemukakan oleh John Elkington tahun 1997, Dimana konsep ini mendorong keseimbangan kelestarian lingkungan sekitar wilayah operasi (*planet*), memberikan manfaat kepada masyarakat (*people*), dan mendapatkan nilai tambah untuk menjaga kelangsungan operasi (*profit*). Teori ini menekankan pencapaian kemakmuran ekonomi, perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab sosial secara bersamaan (Canciglieri Junior et al., 2013; Vanclay, 2002). Pada lingkup organisasi pemerintah, teori ini menjaga agar pemerintah dalam mengejar Pembangunan ekonomi daerah tidak mengabaikan kelestarian lingkungan dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Dengan menetapkan standar dan memantau kepatuhan, pemerintah dan badan pengatur sangat membantu TBL. Hal ini menjamin bahwa organisasi bertindak untuk kepentingan umum karena sistem alam dan sosial akan bertahan selama waktu yang lama (Brown et al., 2008).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu “kendaraan” yang digunakan peneliti dalam memandu peneliti untuk memahami masalah terkait fenomena yang diinginkan dicapai dalam penelitiannya. Ilmu akuntansi seperti halnya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya mempunyai hubungan erat dengan perilaku manusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian studi wacana. Pendekatan dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk memperoleh pemahaman umum tentang realitas sosial dari sudut pandang informan. Peneliti menggunakan pendekatan analisis wacana sebagai “sarana” untuk mendampingi penelitian hingga akhir karena ingin menggambarkan realitas yang kompleks kemudian memaknainya. Analisis wacana adalah pendekatan yang relevan karena konstruksi sosial seperti norma, nilai, dan konteks lokal sering memengaruhi pelaporan keberlanjutan, yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi narasi, interpretasi, dan pembingkai masalah yang diungkapkan oleh informan sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pelaporan keberlanjutan dipersepsikan, diartikulasikan, dan dipraktikkan.

Informan kunci dalam penelitian Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Sulawesi Barat, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dan Kepala Bidang Bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan serta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Barat. Pemilihan lokasi penelitian di Provinsi Sulawesi Barat didasarkan pada relevansi konteks lokal terhadap isu pelaporan keberlanjutan. Provinsi ini memiliki tantangan dan potensi besar terkait pengelolaan lingkungan hidup, terutama mengingat perannya sebagai daerah yang terus berkembang dalam berbagai sektor, seperti pertanian, perkebunan, dan sumber daya alam. Pelaporan keberlanjutan di wilayah ini menjadi penting untuk mencerminkan bagaimana

pemerintah daerah dan pemangku kepentingan merespons tantangan lingkungan secara bertanggung jawab melalui praktik pelaporan yang transparan.

Waktu penelitian yang dijadwalkan pada Juli hingga September 2024 dipilih dengan mempertimbangkan dua hal. Dengan mendatangi lokasi kerja informan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Barat, peneliti dapat menggali perspektif dari berbagai pihak yang secara peran akan terlibat dan berkepentingan dalam pelaporan keberlanjutan. Kombinasi waktu dan lokasi ini memastikan penelitian dapat mengumpulkan data yang kontekstual, relevan, dan mencerminkan realitas di lapangan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan transparansi dan kredibilitas hasil. Langkah pertama adalah pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan menggunakan triangulasi metode untuk memastikan keakuratan informasi dari berbagai sumber. Data mentah yang diperoleh kemudian direduksi melalui proses seleksi, penyederhanaan, dan penyusunan secara sistematis. Selanjutnya, data yang telah diringkas dikelompokkan ke dalam kategori tertentu berdasarkan tema-tema utama yang muncul. Setelah itu, data disajikan dalam bentuk narasi untuk membantu peneliti mengidentifikasi pola dan hubungan antar tema. Pada tahap akhir, sebelum kesimpulan peneliti melakukan verifikasi kepada informan (*membercheck*). Terakhir penarikan kesimpulan, di mana temuan dianalisis secara mendalam untuk memahami makna pelaporan keuangan berkelanjutan bagi informan. Terkait persoalan keandalan dan kredibilitas, data yang diperoleh diuji menggunakan triangulasi metode, ketekunan peneliti dalam pengamatan, membangun partisipasi yang empatik, serta memberikan penjelasan sesuai dengan realitas yang didengarm dilihat dan dirasakan oleh penelit. Selain itu hasil analisis dikonfirmasi kembali kepada informan melalui proses *membercheck*. Dengan langkah-langkah ini, penelitian memastikan bahwa analisis data dilakukan secara teliti dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Informan penelitian ini terdiri dari beberapa entitas untuk bentuk triangulasi yang dilakukan meliputi:

1. Pengajuan pertanyaan yang sama kepada setiap informan;
2. Pengajuan pertanyaan yang berulang pada saat wawancara (*member check*);
3. Peneliti melakukan konfirmasi kepada beberapa informan;
4. Membandingkan data hasil pengamatan dan hasil wawancara;
5. Tersedianya bukti rekaman dari wawancara dengan masing-masing informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wajah Lingkungan Hidup Hari Ini

Lingkungan hidup merupakan asset terbesar yang dimiliki oleh umat manusia. Sejak lama telah dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Seiring berjalannya waktu pemanfaatan sumberdaya lingkungan telah menggerus bahkan berdampak pada terjadinya krisis lingkungan (Lang, 2023). Pada jangka pendek, misinformasi, konflik sosial, dan keamanan siber berada di puncak risiko, yang menunjukkan bahwa dunia saat ini menghadapi ancaman langsung dari ketidakstabilan politik dan sosial, serta serangan terhadap infrastruktur digital. Namun, dalam jangka panjang, ancaman dari perubahan iklim dan kerusakan lingkungan menjadi semakin menonjol, menggambarkan dampak kumulatif dari krisis iklim terhadap keberlanjutan hidup manusia dan ekosistem bumi. Hasil wawancara dengan informan dari Walhi menjelaskan kondisi ini juga terjadi di Sulawesi Barat:

“Memang agak memprihatinkan, misalnya alih fungsi lahan misalnya di beberapa wilayah di area hutan lindung itu sudah masuk wilayah wilayah yang dialih fungsikan ada yang jadi tambang ada yang ini” (Informan 5)

Telah terjadi degradasi lingkungan yang signifikan, alih fungsi yang mengancam keseimbangan ekosistem hutan, yang memiliki peran penting dalam menyerap karbon, melindungi keanekaragaman hayati, dan menjaga siklus air. Selain itu, perubahan fungsi lahan ini juga berdampak pada masyarakat lokal yang bergantung pada hutan sebagai sumber penghidupan, seperti untuk hasil hutan non-kayu dan akses air bersih. Aktivitas tersebut semakin menjelaskan lingkungan sebagai asset penting bagi kehidupan manusia. Lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap kawasan hutan lindung, di mana alih fungsi sering terjadi tanpa pertimbangan lingkungan jangka panjang.

"Kalau kondisi lingkungan di Sulawesi Barat ini, dibidang bagus juga tidak, yang jelas sudah banyak alih fungsi lahan. Nah ini bisa buruk kedepan, kalau tidak diawasan baik-baik bisa jadi lebih parah, apalagi ada IKN yang banyak bahan materialnya dimabil dari wilayah kita."(Informan 4)

Dampak buruk dari eksploitasi hutan lindung ini tidak hanya terbatas pada kerusakan ekosistem, tetapi juga memicu konflik lahan dan memiskinkan masyarakat sekitar. Kekhawatiran ini menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam di Sulawesi Barat memerlukan perhatian serius untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak.

Kesadaran Pemerintah Dalam Menjamin Berkelanjutan

Pemerintah merupakan organisasi yang sangat besar di Indonesia. Menurut (Mol et al., 2024) organisasi pemerintah berperan dalam memberikan kebijakan publik untuk memastikan berbagai layanan. Oleh karena itu, pemerintah dapat memainkan peran penting dalam membangun masyarakat untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Peran pemerintah sangat besar dalam hal membuat kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan (Sarabdeen, 2024), selain itu peran besar terlihat dari tanggung jawab pemerintah untuk mengelola barang, sumber daya, dan fasilitas publik dengan cara yang menguntungkan masyarakat dan mendukung kemajuan berkelanjutan (I. Hossain et al., 2023). Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tersebut belum disadari oleh pemerintah daerah.

"Kita di Provinsi Sulawesi Barat lingkungan menjadi salah satu isu strategis kedepan baik jangka menengah dan panjang. Cuman memang secara teknis kebijakan dan penganggaran belum mendukung hal tersebut". (Informan 2)

Informan menyadari pentingnya masalah lingkungan ini, yang berarti dampaknya terhadap keberlanjutan daerah tidak bisa diabaikan. Namun, meskipun isu ini dianggap penting, terdapat kesenjangan signifikan antara kesadaran terhadap masalah lingkungan dan implementasi teknis di lapangan, khususnya dalam hal kebijakan dan penganggaran. Jika kesenjangan ini tidak segera diatasi, dampak lingkungan yang semakin buruk dapat mengancam pembangunan daerah dalam jangka panjang. Selain itu kesadaran dari aspek regulasi tentang urgensi untuk menjaga kelestarian lingkungan belum menjangkau aspek monitoring dan evaluasi kinerja lingkungan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan berikut ini:

"Audit lingkungan pernah kami lakukan, tetapi sifatnya masih sukarela. Sebagai badan pengawas memang belum ada regulasi yang mewajibkan untuk memeriksa masalah lingkungan hidup. Lingkungan kalau kita lihat hari ini, semakin tidak kondusif lagi, karena aktivitas eksploitasi yang terjadi". (Informan 1)

Meskipun ada inisiatif dari beberapa pihak untuk melakukan audit lingkungan, tidak ada regulasi yang secara spesifik mengharuskan pemeriksaan atas masalah lingkungan hidup oleh badan pengawas terkait. Ketiadaan regulasi ini menciptakan kekosongan dalam pengawasan dan akuntabilitas terkait pengelolaan lingkungan, yang berkontribusi terhadap kondisi lingkungan yang semakin memburuk. Informan juga menyoroti bahwa kondisi lingkungan saat ini semakin tidak kondusif, terutama akibat aktivitas eksploitasi yang terus berlangsung tanpa pengawasan yang memadai. Ini mengindikasikan bahwa, tanpa regulasi dan pengawasan yang ketat, aktivitas-aktivitas

seperti penebangan hutan, pertambangan, atau kegiatan industri lainnya berpotensi merusak lingkungan secara lebih luas, yang dapat mengancam keseimbangan ekosistem dan kehidupan masyarakat.

Laporan Keuangan Berkelanjutan Sebagai Wajah Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Wajah pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dapat dilihat di laporan keuangan yang dihasilkan. Wajah pemerintah daerah dalam menangani persoalan lingkungan yang hari ini sangat mendesak juga dapat dilihat pada laporan keuangan berkelanjutan (*Sustainability Reporting*) (Nazaruddin et al., 2023). Pada banyak negara merupakan sebuah pendekatan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (*environmental, social, and governance* atau ESG) ke dalam pelaporan keuangan tradisional.

“Laporan keuangan itukan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah. Semua program dan kegiatan yang dilaksanakan dipertanggungjawabkan dijelaskan. Jadi kalau misalkan kalau ada laporan keuangan yang memasukan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan dan sosial, itu berarti bentuk pertanggungjawaban kami, baik untuk generasi sekarang dan akan datang. Cumakan, kami dipemerintah daerah belum ada kewajiban dan bagaimana bentuknya juga belum diketahui”.(Informan 3)

Informan mengakui pentingnya memasukkan aspek lingkungan dan sosial dalam laporan keuangan, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah tidak hanya kepada masyarakat saat ini, tetapi juga kepada generasi mendatang. Dalam konteks pemerintah daerah, laporan ini tidak hanya menyajikan data keuangan tetapi juga mencakup dampak kebijakan dan program terhadap lingkungan hidup dan kesejahteraan Masyarakat. Penerapan laporan keuangan berkelanjutan menjadi penting karena mencerminkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya secara transparan dan bertanggung jawab (Aurelio et al., 2020).

Melalui laporan keuangan berkelanjutan, pemerintah daerah dapat menunjukkan bagaimana anggaran publik digunakan untuk program-program yang mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk upaya pelestarian lingkungan, pengurangan ketimpangan sosial, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) (Jebreel et al., 2020). Hal ini memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk membangun kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan bahwa setiap keputusan anggaran dan kebijakan yang diambil mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan kualitas hidup masyarakat (Roberto et al., 2020).

Selain itu, laporan keuangan berkelanjutan juga membantu dalam memperkuat pengambilan keputusan strategis pemerintah daerah. Data yang terkumpul dari pelaporan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko lingkungan dan sosial, serta mengarahkan alokasi sumber daya yang lebih efektif untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi (Shahib et al., 2020). Dengan demikian, laporan keuangan berkelanjutan mendukung tata kelola yang lebih baik dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah selaras dengan prinsip keberlanjutan.

Urgensi Laporan Keuangan Berkelanjutan Bagi Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Berkelanjutan (*Sustainability Reporting*) menjadi semakin penting bagi pemerintah daerah di tengah meningkatnya perhatian terhadap keberlanjutan dan dampak lingkungan dari kebijakan publik. Hasil penelitian (Adams & Frost, 2008) menunjukkan bahwa pelaporan keberlanjutan membantu pemerintah daerah di negara maju meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya; namun, mereka juga mencatat bahwa kurangnya kerangka kerja yang sesuai dengan kebutuhan sektor publik. Hal ini sejalan dengan keadaan di Indonesia, di mana undang-undang belum mewajibkan pelaporan keberlanjutan. Akibatnya, kebijakan yang mendukung pelaksanaan laporan ini diperlukan. Laporan ini tidak hanya mencakup

aspek keuangan tradisional, tetapi juga memasukkan elemen sosial, lingkungan, dan tata kelola dalam pengelolaan sumber daya daerah.

Laporan keuangan berkelanjutan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Masyarakat dapat mengetahui bagaimana pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program-program yang mendukung keberlanjutan, termasuk inisiatif lingkungan, pengurangan ketimpangan sosial, serta perlindungan sumber daya alam. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, terutama dalam era keterbukaan informasi dan peningkatan tuntutan masyarakat akan tata kelola yang baik. Pelaporan keuangan berkelanjutan oleh pemerintah daerah akan menjadi wajah baru akuntabilitas pemerintah daerah. Dengan memasukkan dampak sosial dan lingkungan dalam pelaporan, pemerintah daerah tidak hanya bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan saat ini, tetapi juga mempertanggungjawabkan dampak kebijakan bagi generasi mendatang. Hal ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan, di mana kesejahteraan jangka panjang harus diperhitungkan dalam setiap keputusan publik. Penelitian (Bebbington & Larrinaga, 2014) menunjukkan bahwa pelaporan keberlanjutan digunakan sebagai alat membangun kepercayaan publik dan legitimasi pemerintah, meskipun memerlukan kapasitas teknis serta komitmen politik yang kuat.

Laporan keuangan berkelanjutan dapat membantu pemerintah daerah di Indonesia dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan lingkungan dan sosial. Meskipun sebagai negara berkembang pelaporan keberlanjutan sering diabaikan (Khan, 2022). Perubahan iklim, bencana alam, serta ketidaksetaraan sosial dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi daerah. Dengan memantau dan melaporkan dampak dari faktor-faktor tersebut, pemerintah dapat mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin mengancam pembangunan daerah dan mengembangkan strategi mitigasi yang lebih efektif. Pelaporan keuangan ini akan mendorong perencanaan jangka panjang yang lebih terarah dan berkelanjutan. Pemerintah daerah dapat menggunakan data yang terkumpul melalui pelaporan ini untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya, menyesuaikan kebijakan pembangunan, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan sosial.

Namun, meskipun penting, penerapan laporan keuangan berkelanjutan di pemerintah daerah masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya regulasi yang jelas, sumber daya manusia yang terbatas, dan minimnya pemahaman akan standar pelaporan keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam mengembangkan kerangka kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan laporan ini di tingkat daerah. Dengan demikian, laporan keuangan berkelanjutan bukan hanya sebuah tren global, tetapi juga sebuah kebutuhan mendesak bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang lebih baik, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

KESIMPULAN

Pemerintah daerah menyadari pentingnya pelestarian lingkungan sebagai isu strategis untuk jangka panjang, kesenjangan antara kesadaran tersebut dengan implementasi teknis di lapangan masih signifikan, terutama terkait dengan kebijakan dan penganggaran. Lemahnya penegakan hukum serta ketiadaan regulasi yang mengatur audit lingkungan secara wajib memperparah situasi ini, sehingga upaya pengelolaan lingkungan tidak maksimal. Di sisi lain, laporan keuangan berkelanjutan menjadi instrumen yang penting untuk memastikan akuntabilitas pemerintah daerah, terutama dalam menangani isu-isu lingkungan dan sosial. Penerapan laporan keuangan berkelanjutan di pemerintah daerah masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya regulasi yang jelas dan minimnya pemahaman akan standar pelaporan keberlanjutan. Secara keseluruhan, untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan keberlanjutan di masa depan, perlu adanya komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah dalam memperbaiki kebijakan,

alokasi anggaran, serta penegakan regulasi yang mendukung pelestarian lingkungan dan penerapan laporan keuangan berkelanjutan. Dengan demikian, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial dapat terwujud.

SARAN

1. Saran Praktis:
 - a. Penguatan Regulasi, Pemerintah harus segera merumuskan regulasi yang mewajibkan pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan berkelanjutan dengan tahapan yang tepat.
 - b. Laporan Keuangan Berkelanjutan: Pemerintah daerah sejak dini mempersiapkan melalui bidang tertentu untuk menyusun laporan keuangan berkelanjutan dengan fokus pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).
 - c. Kolaborasi Sektor Swasta: Mendorong sektor swasta berkontribusi membantu pemerintah daerah bersiap diri dalam menyusun laporan keuangan berkelanjutan melalui program CSR, seperti memberikan bantuan pembiayaan bagi aparatur pemerintah daerah untuk mengikuti pelatihan pelaporan keuangan berkelanjutan.
 - d. Integrasi Kebijakan Lingkungan: Kebijakan lingkungan harus menjadi bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang pemerintah daerah.
2. Saran Teoritis
 - a. Pengembangan kerangka konseptual pelaporan keberlanjutan di sektor publik, hasil penelitian ini dapat mendorong pengembangan teori yang mengintegrasikan konsep *sustainability reporting* ke dalam tata kelola keuangan sektor publik. Teori ini dapat mencakup adaptasi prinsip-prinsip pelaporan keberlanjutan dari sektor swasta (seperti GRI Standards) ke dalam sistem pemerintahan daerah, dengan mempertimbangkan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan.
 - b. Integrasi teori legitimasi dan teori akuntabilitas, Penelitian ini dapat mendukung teori bahwa pelaporan keberlanjutan di pemerintah daerah bukan hanya tentang transparansi keuangan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme legitimasi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Pemerintah daerah dapat membangun kepercayaan publik dengan menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan melalui pelaporan yang komprehensif.
 - c. Pengembangan Teori Wacana dalam Konteks Pelaporan Keuangan, dengan menggunakan pendekatan studi wacana, penelitian ini dapat memperkaya teori tentang bagaimana pelaporan keberlanjutan dipahami, dibingkai, dan diperdebatkan di level pemerintah daerah. Hal ini dapat memberikan perspektif baru tentang dinamika sosial dan politik di balik implementasi pelaporan keberlanjutan.

REFERENCE

- Abidi, S. A. (2020). *Examining Progress on Sustainable Development Goals Across Regions through an Intertemporal Lens Syed*. 9(3), 85–94. <https://doi.org/10.61506/02.00011>
- Adams, C. A., & Frost, G. R. (2008). Integrating sustainability reporting into management practices. *Accounting Forum*, 32(4), 288–302. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.accfor.2008.05.002>
- Akbaş, M. Ç. (2022). Sustainability Reporting In Local Governments In Turkey: Assessments And Recommendations. *Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 8(2), 222–234. <https://doi.org/10.29131/uiibd.1210103>
- Anindita, R., & Hamidah, H. (2020). Akuntansi Lingkungan Dalam Pitutur Luhur Kejawaen. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 278–296. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.17>
- Armstrong, A., & Li, Y. (2022). Governance and Sustainability in Local Government. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 16(2), 12–31. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v16i2.3>

- Aurelio, T., Luca, D. B., Gennaro, M., & Giulia, L. (2020). Environmental reporting, accountability and governance of local governments: An Italian multiple case study. *African Journal of Business Management*, 14(8), 229–242. <https://doi.org/10.5897/ajbm2020.9027>
- Basir, I. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia , Pemanfaatan Teknologi Informasi , Dan Komitmen Organisasi Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei pada OPD Provinsi Sulawesi Tengah). *MANARANG : Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 04(April), 149–159.
- Bebbington, J., & Larrinaga, C. (2014). Accounting and sustainable development: An exploration. *Accounting, Organizations and Society*, 39(6), 395–413. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.aos.2014.01.003>
- Brown, D., Dillard, J. F., Dillard, J., & Marshall, R. S. (2008). *Triple Bottom Line: A Business Metaphor for a Social Construct*. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203892978-21/triple-bottom-line-business-metaphor-social-construct-darrell-brown-jesse-dillard-scott-marshall>
- Burgess, S., Propper, C., Ratto, M., & Tominey, E. (2017). Incentives in the Public Sector: Evidence from a Government Agency. *Economic Journal*, 127(605), F117–F141. <https://doi.org/10.1111/eoj.12422>
- Canciglieri Junior, O., Mattioda, R., Teixeira Fernandes, P., Detro, S., & Casela, J. (2013). Principle of Triple Bottom Line in the Integrated Development of Sustainable Products. *CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS*, 35, 199–204. <https://doi.org/10.3303/CET1335033>
- Domingues, A. R., Lozano, R., Ceulemans, K., & Ramos, T. B. (2017). Sustainability reporting in public sector organisations: Exploring the relation between the reporting process and organisational change management for sustainability. *Journal of Environmental Management*, 192, 292–301. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.01.074>
- Forum, W. E. (2024). On the Global Risks Report 2024. In *Economic and Political Weekly* 59(9).
- French, D., & Kotzé, L. J. (2018). *Sustainable Development Goals: Law, Theory and Implementation*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781786438768>
- García-Machado, J. J., Papa, M., & Carrassi, M. (2023). The influence of the beliefs of Italian and Spanish managers in their engagement in sustainability reporting. *Discover Sustainability*, 4(1). <https://doi.org/10.1007/s43621-023-00171-5>
- Hossain, I., Haque, A. K. M. M., & Ullah, S. M. A. (2023). Role of Government Institutions in Promoting Sustainable Development in Bangladesh: An Environmental Governance Perspective. *Journal of Current Social and Political Issues*, 1(2), 42–53. <https://doi.org/10.15575/jcspi.v1i2.485>
- Hossain, M. M. (2018). Sustainability reporting by Australian local government authorities. *Local Government Studies*, 44(4), 577–600. <https://doi.org/10.1080/03003930.2018.1471397>
- Hussain, N., Rigoni, U., & Orij, R. P. (2018). Corporate Governance and Sustainability Performance: Analysis of Triple Bottom Line Performance. *Journal of Business Ethics*, 149(2), 411–432. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3099-5>
- Jebreel, M., Jebreel, J., & Alhamed, A. A. (2020). The impact of sustainability development reporting on the environmental performance in Jordanian government. *Accounting*, 6(4), 395–400. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.5.002>
- Kaur, A., & Lodhia, S. K. (2019). Key issues and challenges in stakeholder engagement in sustainability reporting. *Pacific Accounting Review*, 31(1), 2–18. <https://doi.org/10.1108/PAR-11-2017-0092>
- Khan, M. A. (2022). ESG disclosure and Firm performance: A bibliometric and meta analysis. *Research in International Business and Finance*, 61, 101668. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2022.101668>

- Lang, P. (2023). Right to a favourable environment in a system of legal values. *E3S Web of Conferences*, 402. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340208049>
- Mihai, F., & Aleca, O. E. (2023). Sustainability Reporting Based on GRI Standards within Organizations in Romania. *Electronics (Switzerland)*, 12(3). <https://doi.org/10.3390/electronics12030690>
- Mol, A., van Schie, V., & Budding, T. (2024). Drivers of sustainability reporting by local governments over time: A structured literature review. *Financial Accountability and Management*, October 2023, 1–30. <https://doi.org/10.1111/faam.12407>
- Moses, E., Che-Ahmad, A., & Abdulmalik, S. O. (2020). Board governance mechanisms and sustainability reporting quality: A theoretical framework. *Cogent Business and Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1771075>
- Mulawarman, A. dedi;, & Kamayanti, A. (2018). Towards Islamic Accounting Anthropology: how secular anthropology reshaped accounting in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2015-0004>.
- Natalia, I. (2022). Refleksi Yudhistira Dalam Tanggung Jawab Sosial Dan Akuntansi Lingkungan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1), 42–59. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.13.1.04>
- Nazaruddin, I., Rahmandani, Y. M., & Sibuea, S. P. A. (2023). Determinants of Financial Reporting Local Government Organization Transparency and Accountability as a Mediator. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 276. <https://doi.org/10.24843/jiab.2023.v18.i02.p06>
- Niemann, L., & Hoppe, T. (2018). Sustainability reporting by local governments: a magic tool? Lessons on use and usefulness from European pioneers. *Public Management Review*, 20(1), 201–223. <https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1293149>
- Othman, R., Nath, N., & Laswad, F. (2017). Sustainability Reporting by New Zealand's Local Governments. *Australian Accounting Review*, 27(3). <https://doi.org/10.1111/auar.12153>
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*. 1–6. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5260/pp-no-47-tahun-2012>
- Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. 53(4), 130. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/72974/perpres-no-59-tahun-2017>
- Roberto, F., Maglio, R., & Rey, A. (2020). *Accountability and Sustainability Reporting in the Public Sector. Evidence from Italian Municipalities BT - CSR and Sustainability in the Public Sector* (D. Crowther & S. Seifi (eds.); pp. 19–34). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-6366-9_2
- Sarabdeen, J. (2024). The Role of Government in Driving Sustainability: A Public Policy Perceptive. *Emerging Science Journal*, 8(3), 1184–1200. <https://doi.org/10.28991/esj-2024-08-03-023>
- Shahib, H. M., Sukoharsono, E. G., Achsin, M., & Prihatiningtias, Y. W. (2020). Developing Local Government's Socioenvironmental Accountability: Insights from Indonesian Socioenvironmental NGOs' Annual Reports. In K. C. Yekini, L. S. Yekini, & P. Ohalehi (Eds.), *Environmentalism and NGO Accountability* (Vol. 9, pp. 27–54). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/S1479-359820200000009003>
- Uyar, A., Karmani, M., Kuzey, C., Kilic, M., & Yaacoub, C. (2022). Does Governance Quality Explain the Sustainability Reporting Tendency of the Public Sector? Worldwide Evidence. *International Journal of Public Administration*, 45(13), 931–947. <https://doi.org/10.1080/01900692.2021.1900243>
- Uyar, A., Kuzey, C., & Kilic, M. (2021). Testing the Spillover Effects of Sustainability Reporting: Evidence from the Public Sector. *International Journal of Public Administration*, 44(3), 231–240. <https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1677711>
- Vanclay, F. (2002). *Impact assesment and the triple bottom line: Competing pathways to sustainability*, 27-39. Retrieved from [Frank-Vanclay-Impact-Assessment-and-the-TBL-2005.pdf](http://www.frank-vanclay.com/Impact-Assessment-and-the-TBL-2005.pdf)

- Williams, B., Wilmshurst, T., & Clift, R. (2009). Sustainability reporting in local government in australia-a preliminary analysis christchurch, new zealand sustainability reporting in local government in australia-a preliminary analysis. *Australasian Conference on Social and Environment Accounting Research (CSEAR 2009), December*. Retrieved from https://figshare.utas.edu.au/articles/conference_contribution/Sustainability_reporting_in_local_government_in_Australia_-_a_preliminary_analysis/23087735/1/files/40814021.pdf
- Williams, B., Wilmshurst, T., & Clift, R. (2010). The Role Of Accountants In Sustainability Reporting – A Local Government Study. *Sixth Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Concerenfe(APIRA)* (pp. 1-18). Retrieved from https://www.academia.edu/download/44878139/THE_ROLE_OF_ACCOUNTANTS_IN_SUSTAINABILIT20160418-3347-1gpxqjh.pdf